



Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan

Steffi Kartika Satriya

Universitas Tanjungpura, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat

Korespondensi: aufaezio@gmail.com*

Abstract. *Income inequality remains a fundamental challenge in regional economic development after the implementation of regional autonomy. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies, as measured by the variables of Local Government Revenue (LGR) and the Balancing Fund, on income inequality in 14 regencies/cities in West Kalimantan Province. This study uses a descriptive quantitative approach with panel data for the period 2015–2024. The data analysis technique used is panel data regression with a natural logarithm model. The results of the study show that LGR has a positive and significant influence on income inequality, which indicates that increasing regional fiscal independence actually tends to widen income disparity. Conversely, the Balancing Fund is proven to have a negative and significant effect, confirming its effective role as a redistribution instrument in reducing interregional inequality. Simultaneously, both fiscal instruments have a significant impact on the Gini ratio.*

Keywords: *Fiscal Decentralization, Income Inequality, Disparity*

Abstrak. Ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan fundamental dalam pembangunan ekonomi daerah pasca-implementasi otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal, yang diukur melalui variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, terhadap ketimpangan pendapatan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data panel selama periode 2015–2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan model logaritma natural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah justru cenderung memperlebar disparitas pendapatan. Sebaliknya, Dana Perimbangan terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan, menegaskan perannya yang efektif sebagai instrumen redistribusi dalam menurunkan ketimpangan antarwilayah. Secara simultan, kedua instrumen fiskal tersebut berpengaruh signifikan terhadap rasio Gini.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Ketimpangan Pendapatan, Disparitas

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan pendapatan merupakan tantangan fundamental yang persisten dalam diskursus pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejak era Orde Baru hingga masa Reformasi, paradigma pembangunan nasional terus bergulat mencari titik keseimbangan antara mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi (growth) dan memastikan pemerataan hasil-hasil pembangunan (equity). Dalam lintasan sejarah ekonominya, Indonesia pernah mengalami fase di mana pertumbuhan ekonomi melaju pesat, namun diiringi oleh melebarnya jurang disparitas antarwilayah dan antargolongan pendapatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa trickle-down effect tidak sepenuhnya bekerja secara otomatis dalam

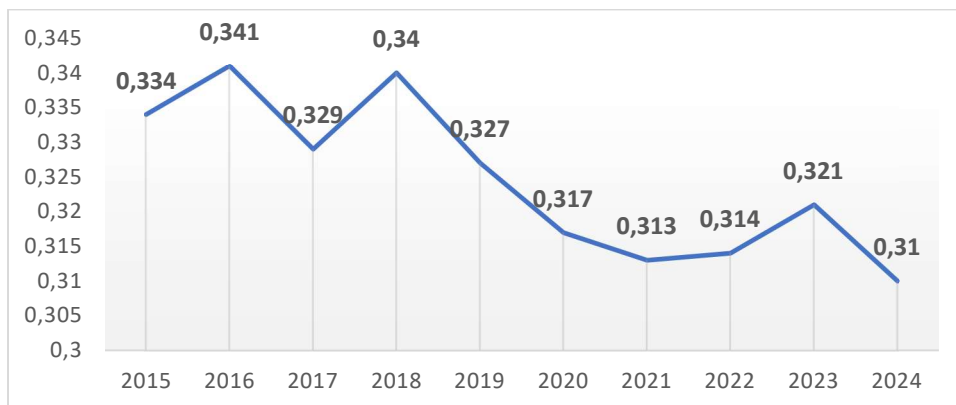
Received: December 02, 2025; Revised: December 07, 2025; Accepted: December 11, 2025;

Published: April 30, 2026

*Corresponding author, e-mail address

mendistribusikan kesejahteraan ke lapisan masyarakat terbawah. Oleh karena itu, instrumen kebijakan yang lebih spesifik dan terlokalisasi diperlukan untuk mengintervensi struktur ekonomi yang timpang.

Sebagai respons terhadap sentralisasi yang dianggap gagal menciptakan pemerataan, Indonesia mengadopsi kebijakan desentralisasi fiskal secara masif pasca-Reformasi. Kebijakan ini, yang diimplementasikan melalui pelimpahan wewenang dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, didasarkan pada teori desentralisasi fiskal (Oates). Menurut Bartolini dkk., (2016), tujuan konseptual desentralisasi fiskal adalah menutup fiskal gap melalui dua pendekatan: vertikal (menyeimbangkan keuangan pusat-daerah) dan horizontal (meminimalkan ketidaksetaraan fiskal antard aerah) demi tercapainya pemerataan. Dasar utamanya adalah bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Dengan demikian, melalui instrumen transfer ke daerah (Dana Perimbangan) dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah diharapkan mampu merancang belanja publik yang lebih presisi untuk menanggulangi kemiskinan dan mereduksi ketimpangan pendapatan di wilayah yurisdiksinya. Namun, efektivitas desentralisasi ini masih menjadi perdebatan akademis, mengingat variasi kapasitas fiskal antardaerah yang justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.



Gambar 1. Perkembangan Rasio Gini Provinsi Kalimantan Barat

Dalam konteks regional, Provinsi Kalimantan Barat menjadi representasi menarik untuk menguji efektivitas kebijakan tersebut. Sebagai provinsi dengan wilayah yang luas dan karakteristik ekonomi yang beragam, mulai dari sektor perkebunan hingga pertambangan, Kalimantan Barat menghadapi dinamika ketimpangan yang fluktuatif dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data perkembangan rasio Gini periode 2015 hingga 2024, terlihat adanya volatilitas tingkat ketimpangan di provinsi ini. Pada awal periode pengamatan, rasio Gini

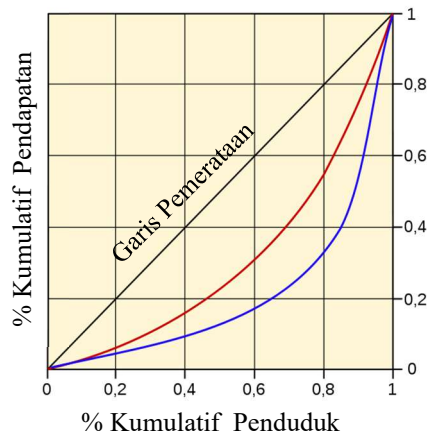
sempat mencapai titik tertinggi di level 0,341 pada tahun 2016, sebelum mengalami tren penurunan yang moderat, meskipun kembali mengalami lonjakan pada tahun 2018 (0,34) dan 2023 (0,321). Menariknya, pada tahun 2024, angka ketimpangan berhasil ditekan ke level terendah dalam satu dekade terakhir, yakni di angka 0,31. Fluktuasi data ini mengindikasikan bahwa kondisi distribusi pendapatan di Kalimantan Barat sangat sensitif terhadap perubahan kondisi makroekonomi dan intervensi kebijakan fiskal yang diterapkan.

Dinamika ketimpangan di Kalimantan Barat ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana pemerintah kabupaten/kota mengelola kapasitas fiskalnya. Selama periode 2015-2024, yang juga mencakup masa guncangan pandemi dan pemulihan ekonomi, peran instrumen desentralisasi fiskal menjadi sangat krusial. Variabel seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian ekonomi daerah, sementara Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) menunjukkan peran negara dalam menutupi celah fiskal (fiscal gap). Menurut Lorasgimeno et al., (2024) redistribusi fiskal terbukti efektif mempersempit gap pendapatan Masyarakat.

Pertanyaan mendasarnya adalah, sejauh mana desentralisasi fiskal tersebut berkontribusinya nyata terhadap penurunan rasio Gini yang tergambar dalam data satu dekade terakhir? Apakah peningkatan fiskal dari kebijakan desentralisasi di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat berjalan lurus dengan perbaikan distribusi pendapatan, atau justru memperlebar jarak antara daerah kaya sumber daya dengan daerah yang bergantung pada transfer pusat? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal, melalui variabel PAD, dan Dana Perimbangan, terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori disparitas dapat dipahami melalui Kurva Lorenz yang diperkenalkan oleh Max Otto Lorenz sebagai alat untuk menunjukkan konsentrasi kekayaan dalam suatu populasi, dengan menggambarkan hubungan antara persentase kumulatif penduduk dan persentase kumulatif pendapatan. Semakin jauh lengkungan Kurva Lorenz dari garis diagonal kesetaraan sempurna, semakin tinggi tingkat ketimpangan yang tercermin Murad (2019), seperti pada wilayah perkotaan besar yang menyerap porsi besar investasi dan pendapatan sehingga kurvanya melengkung tajam ke bawah.



Sumber : Todaro dan Smith (2011)

Gambar 2. Kurva Lorenz

Berdasarkan pemikiran ini, Corrado Gini kemudian mengembangkan Koefisien Gini yang mengukur luas area antara kurva kesetaraan dan Kurva Lorenz sebagai nilai numerik antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata dan nilai 1 menggambarkan ketimpangan ekstrem ketika satu individu menguasai seluruh pendapatan. Dengan demikian, semakin besar Koefisien Gini mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat disparitas atau ketidakmerataan pendapatan suatu wilayah.

Secara teori, desentralisasi fiskal diharapkan menjadi solusi untuk ketimpangan ekonomi pusat-daerah maupun antardaerah. Teori Federalisme Fiskal (Oates, 1972) menyatakan bahwa pemerintah terpusat sering kurang peka terhadap kebutuhan lokal, sehingga pendelegasian wewenang kepada daerah dapat meningkatkan efisiensi alokasi dan responsivitas kebijakan publik (Ayala dkk., 2021). Di sisi lain, teori keuangan publik dari Musgrave (1989) menggarisbawahi peran pemerintah pusat dalam fungsi distribusi pendapatan, tanpa mekanisme pemerataan dari pusat, daerah berfiskal lemah akan kesulitan membiayai layanan dasar dan ketimpangan antarwilayah bisa kian melebar Martinez dkk., (2017).

Penelitian terdahulu tentang dampak desentralisasi fiskal dan komponennya terhadap ketimpangan menunjukkan hasil beragam. Peningkatan PAD umumnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, mendorong multiplier effect, dan memperbesar ruang fiskal untuk belanja pembangunan. Temuan empiris mendukung pandangan ini, seperti Iiyambo dan Kaulihowa (2020) yang menyatakan PAD berperan penting dalam mendorong belanja daerah. Namun, terdapat pula hasil berbeda seperti Fitriani dkk., (2023) yang menemukan bahwa PAD ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. hubungan positif tetapi tidak signifikan antara PAD dan belanja modal.

Peran dana perimbangan dalam menstabilkan kapasitas fiskal daerah dan memungkinkan perencanaan jangka panjang juga sudah banyak diteliti. Suryatiningrum dkk., (2020) dan Demora (2017) menyatakan bahwa transfer fiskal meningkatkan produktivitas belanja daerah. Namun, ada juga pandangan kritis seperti Mahdavi dan Westerlund (2018) yang menyebutkan bahwa dana transfer sering kali memiliki alokasi terikat sehingga tidak memberikan keleluasaan belanja seperti PAD.

Terkait bagaimana praktik desentralisasi fiskal berdampak terhadap ketimpangan, beberapa penelitian menunjukkan hasil beragam: Yang dkk., (2024) membuktikan bahwa transfer fiskal di Tiongkok mampu mencegah peningkatan ketimpangan hingga 15%, sementara Hoole dkk., (2023) menemukan bahwa di Inggris transfer justru memperdalam kesenjangan karena struktur desentralisasi yang tidak seimbang. Di Indonesia, Akita dkk., (2021) menemukan adanya perbedaan efek antarkomponen transfer, di mana DBH cenderung meningkatkan ketimpangan sedangkan DAU menguranginya.

Pengaruh PAD dan belanja publik terhadap disparitas juga menunjukkan hasil yang tidak seragam. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa peningkatan penerimaan asli daerah dapat menekan ketimpangan pendapatan, seperti Bartolini et al., (2016) pada negara OECD dan Martorano (2018) di Amerika Latin. Namun, terdapat temuan sebaliknya seperti Shahzad dan Yasmin (2016) di Pakistan, serta Sari dan Qibthiyah (2022) di Indonesia yang menemukan bahwa penerimaan pajak tidak signifikan dalam memengaruhi rasio gini. Dampak belanja publik terhadap disparitas pun tidak konstan: Yunker (2016) dan Siburian (2020) menemukan bahwa belanja publik mampu menekan ketimpangan, sementara studi lain seperti Hailemariam dkk., (2021) dan Pietrovito dkk., (2023) menunjukkan bahwa ekspansi belanja justru meningkatkan ketimpangan di negara OECD. Dalam konteks efektivitas desentralisasi, Mauro dkk., (2023) menegaskan bahwa kualitas institusi lokal dan modal sosial sangat menentukan apakah desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan maupun pengeluaran dapat mempersempit atau memperlebar kesenjangan.

Situasi di atas menunjukkan adanya kesenjangan penelitian maupun kebijakan terkait desentralisasi fiskal dan disparitas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan pendekatan komprehensif yang menilai pengaruh simultan PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan. Kebaruan studi terletak pada analisis peran belanja modal sebagai variabel mediasi yang menyalurkan dampak kapasitas fiskal (PAD dan dana perimbangan) terhadap disparitas. Pendekatan ini diharapkan dapat memetakan pengaruh

upaya kebijakan fiskal selama era desentralisasi terhadap ketimpangan pendapatan. Secara khusus, studi ini akan menguji pengaruh langsung PAD, dana perimbangan dan belanja modal terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, serta pengaruh tidak langsung PAD dan dana perimbangan melalui belanja modal sebagai variabel mediasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menganalisis pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP), terhadap ketimpangan pendapatan (G). Data yang digunakan merupakan data panel yang mencakup 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode tahun 2015–2024, sehingga menghasilkan 140 unit observasi. Data ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi pemerintah. Data keuangan daerah (PAD dan DP) diperoleh melalui publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sedangkan indikator disparitas pendapatan diukur menggunakan angka rasio Gini yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (untuk menilai signifikansi pengaruh parsial masing-masing variabel independen) dan uji F (untuk menguji signifikansi pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen dalam model). Nilai koefisien determinasi (R^2) juga dihitung sebagai indikator proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model. Berikut adalah persamaan matematikanya:

$$G_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Informasi:

α	:	Konstanta
$\beta_1 \beta_2$:	Koefisien regresi
G_{it}	:	Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota (i) pada periode (t)
PAD_{it}	:	Pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota (i) pada periode (t)
DP_{it}	:	Dana perimbangan di Kabupaten/Kota (i) pada periode (t)
ε	:	Standar Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas merupakan kondisi di mana terdapat hubungan linear yang pasti atau hampir pasti di antara variabel-variabel independent (Gujarati dan Damodar, 2015).

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	G
	VIF
PAD	1.053653
DP	1.053653

Uji ini berfungsi sebagai diagnostik untuk mendeteksi multikolinearitas sempurna atau kondisi ketika satu variabel bebas merupakan kombinasi linear pasti dari variabel bebas lainnya (Mubarak, 2021). Berdasarkan kriteria umum multikolinearitas, suatu model dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 . Seluruh variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan nilai VIF di bawah angka 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel bebas yang dapat merusak estimasi model regresi.

b) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Kuncoro (2006), heteroskedastisitas terjadi ketika kesalahan atau residual dalam suatu model tidak memiliki varians yang konstan antar pengamatan. Dengan kata lain, setiap data pengamatan memiliki tingkat keandalan yang berbeda karena adanya perubahan kondisi tertentu yang tidak terakomodasi dalam spesifikasi model.

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas	Persamaan
Prob. Resabs Equation	PAD = 0.2681
	DP = 0.9343
Keterangan	Homoskedastisitas

Berdasarkan kriteria pengujian, apabila nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah heterokedastisitas, atau dengan kata lain terdapat kondisi homoskedastisitas. Hal ini berarti varians residual dalam model regresi bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh nilai variabel independen.

2) Hasil Estimasi Regresi

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ekonometrika dengan metode estimasi data panel. Transformasi logaritma digunakan ketika terdapat hubungan non-linear antara variabel independen dan dependen, dengan tujuan mengubah hubungan tersebut menjadi linear. Oleh karena itu, persamaan regresi disusun dalam bentuk model logaritma natural. Dengan demikian, teknik analisis yang diterapkan adalah regresi data panel menggunakan Logaritma Natural (Gujarati & Damodar, 2015) yang bertujuan untuk memperoleh model terbaik yang bebas dari persoalan multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error
C	0.314604	0.008006
PAD	0.0000657	0.0000234
DP	-0.0000206	0.0000069

Berdasarkan table 3, menjelaskan hasil regresi model, pengaruh PAD dan DP terhadap BM, dengan model analisis sebagai berikut:

$$G_{it} = 0.314604 + 0.0000657PAD_{it} - 0.0000206 DP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Nilai tetapan estimasi regresi sebesar 0.314604 menunjukkan bahwa apabila variabel PAD dan DP bernilai nol, maka G diperkirakan sebesar 0,31%.
- 2) Nilai koefisien PAD sebesar 0.0000657 berarti jika PAD meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel lain konstan, maka G diprediksi akan meningkat sebesar 0.0000657%.
- 3) Nilai koefisien DP sebesar -0.0000206 menunjukkan bahwa jika DP meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel lain konstan, maka G diperkirakan turun sebesar 0.0000206%.

3) Hasil Uji Hipotesis

a) Uji t

Uji t bertujuan untuk menilai seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial). Melalui pengujian ini, dapat diketahui seberapa besar peran setiap variabel bebas dalam menerangkan perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Hasil pengujian parsial yang diperoleh disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel Bebas	Variabel Terikat	t-Statistic	Prob.	Keterangan
PAD	G	2.803861	0.0058	Signifikan
DP	G	-2.989065	0.0033	Signifikan

Berdasarkan table 4, dapat interpretasi sebagai berikut:

- a. Pengaruh Variabel PAD terhadap G dengan hasil estimasi menunjukkan nilai t-statistic sebesar 2.803861 dan nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0.0058. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 ($\alpha < 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel G.
- b. Pengaruh Variabel DP terhadap G dengan hasil pengujian menunjukkan nilai t-statistic sebesar -2.989065 dan nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0.0000. Mengingat nilai $\alpha < 0.05$, maka variabel DP terbukti memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel G.

b) Uji F

Prosedur untuk menguji signifikansi simultan (uji F) dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dari statistik F. Pengujian ini dilakukan dengan asumsi bahwa apabila nilai probabilitas F lebih kecil dari tingkat signifikansi α (0,05), maka hasilnya dianggap signifikan. Dalam kondisi tersebut, model yang diestimasi dapat diterima atau dianggap layak digunakan. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas F lebih besar dari α (0,05) atau tidak signifikan, maka model yang diestimasi dianggap tidak layak untuk diterima.

Tabel 5. Hasil Uji F

Uji Simultan	F-Statistic	Prob.
PAD dan DP terhadap G	6.855979	0.001453

Dari tabel 5, nilai F-Statistic sebesar 6.855979 dengan nilai probabilitas 0.001453 (lebih kecil dari 0,05), menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Artinya, PAD dan DP secara bersama-sama terbukti memiliki pengaruh signifikan.

c) Uji Determinasi

Perhitungan koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dalam penelitian mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 1 menunjukkan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi	R-squared	Adjusted R-squared
PAD dan DP terhadap G	0.090981	0.077711

Pada estimasi persamaan, diperoleh nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0.090981. Nilai ini mengindikasikan bahwa variasi dari seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam persamaan mampu menjelaskan variasi pada variabel terikat sebesar 9,1%. Sementara sisanya sebesar 91,9%, dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.077711 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap derajat kebebasan akibat penambahan variabel, model ini masih memiliki konsistensi daya jelaskan yang relatif stabil di angka 7,77%.

4) Pembahasan

a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t-statistic sebesar 2,803861 dengan nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,0058. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$), sehingga secara statistik PAD berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2015–2024. Tanda koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan PAD berkorelasi dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Secara empiris, temuan ini dapat dijelaskan oleh kondisi bahwa peningkatan PAD di Kalimantan Barat belum terdistribusi secara merata antar daerah maupun kelompok penduduk. Kabupaten/kota dengan PAD tinggi umumnya berasal dari wilayah perkotaan

atau daerah dengan aktivitas ekonomi dominan. Temuan ini sejalan dengan Shahzad dan Yasmin (2016) yang menemukan kenaikan pada penerimaan pemerintah di tingkat provinsi, turut menambah ketimpangan yang terlihat dari indeks gini.

Sumber PAD sebagian besar masih bertumpu pada: Pajak daerah (hotel, restoran, reklame), retribusi jasa usaha dan jasa umum, aktivitas perdagangan dan jasa perkotaan. Sementara itu, kabupaten yang lebih bergantung pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan cenderung memiliki: basis PAD yang relatif kecil, keterbatasan diversifikasi ekonomi, daya ungkit fiskal yang rendah. Akibatnya, peningkatan PAD lebih banyak dinikmati oleh wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi tinggi dan kelompok masyarakat tertentu, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Kalimantan Barat.

b) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Variabel Dana Perimbangan (DP) memiliki nilai t-statistic sebesar $-2,989065$ dengan nilai probabilitas (Prob.) sebesar $0,0033$, yang juga lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tanda koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Perimbangan berasosiasi dengan penurunan ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

Secara kontekstual, hasil ini mencerminkan peran Dana Perimbangan sebagai instrumen pemerataan fiskal antar daerah. Dalam struktur keuangan daerah di Kalimantan Barat, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), menjadi sumber pendanaan utama bagi sebagian besar kabupaten. Dana Perimbangan memungkinkan pemerintah daerah membiayai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, mendukung penyediaan layanan publik di wilayah dengan PAD rendah, dan menekan kesenjangan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota. Yang dkk., (2024) mengungkapkan fakta terkait skema desentralisasi fiskal implementasi pemerataan regional di wilayah Tiongkok. Transfer fiskal sejak reformasi pajak 1994 berhasil mencegah peningkatan ketimpangan regional sebesar 15%. Aturan transfer yang diseragamkan dalam hal redistribusi tetapi tetap mempertahankan insentif fiskal, terbukti dapat mengurangi ketimpangan di Tiongkok.

Dalam konteks Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik geografis luas, kepadatan penduduk rendah, dan ketergantungan pada sektor primer, Dana Perimbangan berfungsi sebagai mekanisme kompensasi fiskal yang membantu daerah tertinggal dan pedesaan untuk tetap menyediakan pelayanan publik minimum. Efek redistributif inilah yang secara empiris berkontribusi menurunkan ketimpangan pendapatan antar wilayah dan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Berdasarkan analisis empiris mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2015–2024, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama; Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah yang tercermin dari peningkatan PAD, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Fenomena ini terjadi karena sumber-sumber PAD di Kalimantan Barat, seperti pajak dan retribusi, cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau daerah dengan basis ekonomi kuat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh PAD lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu dan wilayah yang sudah maju, sehingga memperlebar jurang disparitas dengan wilayah pedesaan atau daerah tertinggal.

Kedua, Dana Perimbangan (DP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme transfer dari pemerintah pusat ke daerah efektif dalam mereduksi kesenjangan. Dana Perimbangan berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang menutupi celah fiskal (fiscal gap), memungkinkan pemerintah daerah di wilayah dengan kapasitas fiskal rendah untuk tetap menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, kehadiran Dana Perimbangan mampu menyeimbangkan kapasitas antardaerah dan menekan angka rasio Gini di Kalimantan Barat.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Murad. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Dikabupaten/Kota Di Ntb. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI*, 2(2). <https://doi.org/10.54712/aliansi.v2i2.37>
- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional*

- Science Policy and Practice*, 13(6), 1842–1865. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Ayala, L., Herrero, A., & Martinez-Vazquez, J. (2021). Welfare benefits in highly decentralized fiscal systems: Evidence on interregional mimicking. *Papers in Regional Science*, 100(5), 1178–1208. <https://doi.org/10.1111/pirs.12605>
- Bartolini, D., Stossberg, S., & Blöchliger, H. (2016). Fiscal Decentralisation and Regional Disparities. *OECD Working Papers on Fiscal Federalism*, 1330, 3. https://www.oecd-ilibrary.org/fiscal-decentralisation-and-regional-disparities_5jlpq7v3j237.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2F5jlpq7v3j237-en&mimeType=pdf
- Demora, V. (2017). Analisis derajat desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 13–20. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i1.3952>
- Economics, E. O. F., Economics, P. O. F., Of, E., Issues, S., Economics, M., Economics, I., Economics, A., & Economics, U. (n.d.). *The McGraw-Hill Series*.
- Hailemariam, A., Sakutukwa, T., & Dzhumashev, R. (2021). Long-term determinants of income inequality: evidence from panel data over 1870–2016. *Empirical Economics*, 61(4), 1935–1958. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01956-7>
- Hoole, C., Collinson, S., & Newman, J. (2023). England’s catch-22: institutional limitations to achieving balanced growth through devolution. *Contemporary Social Science*, 18(3–4), 428–448. <https://doi.org/10.1080/21582041.2023.2203122>
- Iiyambo, H., & Kaulihowa, T. (2020). An assessment of the relationship between public debt, government expenditure and revenue in Namibia. *Public Sector Economics*, 44(3), 331–353. <https://doi.org/10.3326/pse.44.3.3>
- Kuncoro, M. (2006). *Development Economics*. UPT YKPN.
- Loras-gimeno, D., Gómez-bengoechea, G., & Díaz-lanchas, J. (2024). Fiscal redistribution and the narrowing urban – rural income gap. *Regional Science Policy & Practice*, 16(5), 100045. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100045>
- Mahdavi, S., & Westerlund, J. (2018). Subnational government tax revenue capacity and effort convergence: New evidence from sequential unit root tests. *Economic Modelling*, 73(February), 174–183. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.03.016>
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). the Impact of Fiscal Decentralization: a Survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129. <https://doi.org/10.1111/joes.12182>
- Martorano, B. (2018). Taxation and Inequality in Developing Countries: Lessons from the Recent Experience of Latin America. *Journal of International Development*, 30(2), 256–273. <https://doi.org/10.1002/jid.3350>
- Mauro, L., Pigliaru, F., & Carmeci, G. (2023). Decentralization, social capital, and regional growth: The case of the Italian North-South divide. *European Journal of Political Economy*, 78, 102363. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102363>
- Mubarak, R. (2021). *PENGANTAR EKONOMETRIKA Edisi Pertama*.
- Pendapatan, P., Daerah, A., Modal, B., Pengeluaran, T., Fitriani, P., Baharuddin, D., Purnama, H. R., & Maknun, M. (2023). Center of Economic Student Journal 6 (1) (2023) | 81. *Center of Economic Student Journal*, 6(1), 2621–8186. <https://doi.org/10.33096/csej.v6i1.573>
- Petrovito, F., Pozzolo, A. F., Resce, G., & Scialà, A. (2023). Fiscal decentralization and income (re)distribution in OECD countries’ regions. *Structural Change and Economic Dynamics*, 67(June), 69–81. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.07.002>
- Sari, D., & Qibthiyyah, R. M. (2022). Tax Revenue and Income Inequality. *Jurnal*

- Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(2), 155–172. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i2.326>
- Shahzad, S., & Yasmin, B. (2016). Does fiscal decentralisation matter for poverty and income inequality in Pakistan? *Pakistan Development Review*, 55(4), 781–802. <https://doi.org/10.30541/v55i4i-iipp.781-802>
- Siburian, M. E. (2020). Fiscal decentralization and regional income inequality: evidence from Indonesia. *Applied Economics Letters*, 27(17), 1383–1386. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1683139>
- Suryatinigrum, I., Indarti, I., & Adnanti, W. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), 131–146. <https://doi.org/10.37470/1.22.2.168>
- Todaro, M., & Smith, S. (2011). *Economic Development*. New Jersey.
- Yang, X., Barros, L., Matthews, K., & Meenagh, D. (2024). The dynamics of redistribution, inequality and growth across China's regions. *Journal of Policy Modeling*, 46(3), 613–637. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2024.01.011>
- Yunker, J. A. (2016). Economic inequality and optimal redistribution: A theoretical and empirical analysis. *Journal of Policy Modeling*, 38(3), 528–552. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2016.03.006>